



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Peralihan Anggaran Tanpa Persetujuan

**Temuan BPK Baru
Dikembalikan 51%**

KEPAHIANG - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepahiang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kepahiang menggelar rapat pembahasan Raperda Pelaksanaan APBD tahun 2017, kemarin (7/8). Dari rapat tersebut terungkap terjadi peralihan anggaran tanpa persetujuan dewan dan masih minimnya realisasi pengembalian kerugian kas negara berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Dijelaskan Anggota Banggar DPRD Kepahiang, Edwar Samsi, S.IP, MM,

banyak hal yang dibahas dalam rapat tersebut, namun terpaksa tidak bisa dilanjutkan lantaran banyak dokumen yang tidak dipersiapkan oleh TAPD. "Jadi tadi ada beberapa yang kita minta belum bisa mereka penuhi. Misalnya, seperti dulu kita membuat anggaran kegiatan yang dananya bersumber dari hibah provinsi yang besarnya Rp 8 miliar. Ternyata sampai berakhir masa anggaran 2017 anggaran tersebut tidak dikucurkan provinsi. Namun sebagian kegiatan dari total Rp 8 miliar tersebut sudah dilaksanakan kegiatan dengan total sebesar Rp 3,8 miliar," papar Edwar.

Menurutnya, TAPD menyebutkan anggaran tersebut diambil dari sisa-sisa kegiatan yang ada di Organisasi Perang-

kat Daerah (OPD) untuk menutupi dana sebesar Rp 3,8 miliar. "Seharusnya dalam sistem penganggaran itu tidak boleh dan harus persetujuan dari dewan, mengambil dari anggaran OPD itu tidak boleh. Yang kita sesalkan kenapa dicairkan. Seharusnya ketika anggaran tidak cair, kegiatan Rp 3,8 miliar itu tidak bisa dilaksanakan atau jangan dilaksanakan sebelum dana itu ada di Kasda," tandas Edwar.

Dibeberkannya, diantara pelaksanaan kegiatan tersebut membeli dump truck senilai Rp 700 juta. Kemudian, lanjut Edwar, ada juga anggaran pembangunan jembatan penghubung antara Desa Tanjung Alam-Air Hitam. Dulu sempat dianggarkan Rp 4,5 miliar dari APBD

Kabupaten. Namun setelah dapat informasi bahwa dapat dana dari kucuran APBD Provinsi senilai Rp 6 miliar, maka anggaran tersebut batal dianggarkan. Maka dana Rp 4,5 miliar kemudian dibagi untuk beberapa OPD sampai dengan 20 item kegiatan.

"Dibuatlah beberapa kegiatan sampai 20 item kegiatan sepihak oleh bupati. Kita minta rinciannya mana, mereka belum siap. Itu disebar di beberapa dinas. Seharusnya kalau pengalihan anggaran dibahas bersama-sama," jelasnya.

Selain itu, juga dipertanyakan banggar masalah temuan audit BPK yang mencapai Rp 2,1 miliar, ternyata baru diangsur sekitar 51 persen dari jumlah tersebut. Seperti Biaya Operasional

pada Sekretariat Daerah (setda) dari total Rp 666 juta yang baru dikembalikan sebesar Rp 171 juta dengan menyisakan Rp 495 juta yang belum dikembalikan. Kemudian ada kelebihan pembayaran tunjangan PNS pada Badan Keuangan Daerah (BKD) sebesar Rp 246 juta sama sekali belum dikembalikan.

Selanjutnya, Bagian Pemerintahan sebesar Rp 41 juta juga belum ada pengembalian. Sementara di Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 65 juta sudah lunas dan Bappeda senilai Rp 8,9 juta. "Jadi totalnya sekitar 51 persen, kami juga saat pembahasannya ingin masalah ini harus jelas," ujar Edwar. (zie)